

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara

memadai dan wajar (Dinas Sosial Propinsi DIY, 2005). Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi (Data PSKW Yogyakarta, 2011).

Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 131.437 penduduk DIY yang dikategorikan memiliki masalah sosial. Sebagian besar 26,58 % fakir miskin, 24,9 % anak terlantar, 22,67 % keluarga dengan rumah tidak layak huni, 10,35% wanita rentan masalah sosial dan sisanya 15,5 % gelandangan/pengemis anak nakal, anak jalanan, anak balita terlantar, gelandangan, wanita tuna susila, korban narkoba dan eks napi (Katalog Badan Pusat Statistik DIY dalam angka 2011 : 108). Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut merupakan satu keterkaitan permasalahan yang masing-masing memiliki timbal balik negatif. Misalnya keadaan fakir miskin yang dapat berpengaruh terhadap keadaan psikologis, keadaan sosial, dan berbagai permasalahan lainnya, baik pada masyarakat yang secara langsung merasakan hal tersebut, maupun masyarakat secara luas. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi masyarakat DIY saat ini sangat perlu perhatian, terutama terhadap anak-anak

dan wanita dengan keterbatasan diri yang dimilikinya, sehingga sering menjadi korban utama masalah sosial dalam lingkungan.

Selain permasalahan gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonomi, wanita sering kali menjadi korban tindak kekerasan. Dari 347 kasus kekerasan pada wanita di DIY yang menjadi catatan sepanjang tahun 2011, kasus kekerasan pada istri menempati urutan pertama dengan 291 kasus. Di peringkat kedua kekerasan dalam pacaran dengan 41 kasus, 39 kasus perkosaan, 39 kasus pelecehan seksual, 8 kasus kekerasan dalam keluarga dan 1 kasus perdagangan manusia (Lembaga Pemerhati Perempuan Rifka Anisa dalam Ernyta, Andri dan Riza, 2007). Peningkatan kasus kekerasan terhadap wanita yang ada saat ini dapat disebabkan beberapa faktor antara lain: kemiskinan yang menjadikan tingkat stres masyarakat tinggi, pengangguran, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kurangnya pendidikan wanita (Linda Amalia Sari Gumelar dalam Djibril Muhammad, 2010).

Permasalahan-permasalahan yang dialami wanita seperti yang dikemukakan di atas sangat memprihatinkan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas jumlah penyandanganya saja, tetapi juga dilihat dari dampak yang ditimbulkan masalah tersebut baik terhadap wanita yang mengalaminya maupun terhadap masyarakat secara luas. Sehingga dalam penanganan pemberian pelayanan bagi wanita tersebut harus dilakukan secara menyeluruh menyangkut dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam usaha kesejahteraan sosial melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Provinsi DIY yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial dalam menangani masalah sosial pada wanita ditujukan dengan adanya Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta. Awal mulanya PSKW Yogyakarta ditunjukkan khusus bagi klien wanita tuna susila, namun dalam pelaksanaannya PSKW Yogyakarta mengalami keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sehingga pelayanan yang diberikan kepada klien kurang maksimal. Seiring dengan adanya perluasan permasalahan yang dialami wanita saat ini, sasaran klien PSKW Yogyakarta juga diperluas yaitu bagi wanita rawan sosial psikologis dimana wanita tuna susila termasuk didalamnya, dengan tujuan sebagai upaya rehabilitasi dan juga dimaksudkan sebagai kegiatan preventif bagi mereka agar tidak melakukan penyimpangan sosial.

Sasaran pelayanan PSKW Yogyakarta selain ditujukan bagi wanita rawan sosial psikologis Dalam pelaksanaannya PSKW Yogyakarta kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan di PSKW Yogyakarta, hal ini menyebabkan adanya pandangan negatif masyarakat yang menganggap PSKW Yogyakarta sebagai tempat pekerja seks komersil (PSK). Adanya pandangan negatif dari masyarakat tersebut mengakibatkan masyarakat enggan berkunjung dan kurang memberikan dukungan dalam kegiatan-kegiatan di PSKW Yogyakarta.

Keberadaan PSKW Yogyakarta, selain sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya (khususnya wanita) yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial

khususnya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan yang dapat dilakukan dengan salah satu bentuk pelatihan keterampilan. (UU No 11 Tahun 2009 pasal 2 dan 3)

Pelayanan inti di PSKW Yogyakarta adalah pelayanan bimbingan keterampilan yang terdiri dari tiga jenis keterampilan, yaitu keterampilan olahan pangan, keterampilan jahit, dan keterampilan tata rias. Wanita sangat perlu mendapat bimbingan keterampilan, terutama dalam usia produktif (Isran Noor, 2011). Manfaat pemberian keterampilan olahan pangan, keterampilan jahit, dan keterampilan tata rias adalah memberi bekal klien dengan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya agar mereka bisa mandiri dengan keterampilan yang dimiliki (Nuriyah, 2011).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa bimbingan keterampilan memiliki banyak manfaat dalam memberdayakan wanita rawan sosial psikologis di PSKW Yogyakarta. Tetapi selain bimbingan keterampilan tersebut, pelayanan bimbingan lainnya yang diberikan PSKW juga sama pentingnya, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa dalam penanganan pemberian pelayanan bagi wanita rawan sosial psikologis harus dilakukan secara menyeluruh menyangkut dari berbagai aspek kehidupan, sehingga satu sama lain pelayanan bimbingan saling berkaitan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di PSKW Yogyakarta tidak lepas dari peran pekerja sosial, dimana pekerja sosial merupakan seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau

pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial (Kepmensos No. 10/HUK/2007). Pekerja sosial melakukan pendampingan terhadap klien di PSKW dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Di PSKW Yogyakarta terdapat 5 pekerja sosial fungsional yang menangani sekitar kurang lebih 60 klien yang memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda. Keadaan ini menunjukkan adanya keterbatasan jumlah pekerja sosial dalam menangani klien di PSKW Yogyakarta, selain itu adanya perbedaan kemampuan setiap klien serta terbatasnya jumlah sarana dan prasarana keterampilan jahit, tata rias dan olahan pangan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan. Dengan demikian keaktifan dari pekerja sosial dalam melakukan pendampingan dan kesadaran dari klien dirasa sangat penting guna mencapai tujuan dari pemberdayaan keterampilan (Nuriyah, 2011).

Dengan permasalahan yang ada, maka peneliti mengambil penelitian “pendampingan pekerja sosial terhadap klien pada pelaksanaan bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi: gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonomi serta korban kekerasan yang dialami wanita di DIY.
2. Kurang maksimalnya PSKW Yogyakarta dalam menangani masalah wanita tuna susila, karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
3. Perluasan sasaran di PSKW Yogyakarta yang ditunjukan kepada wanita rawan sosial psikologis dimana wanita tuna susila termasuk didalamnya, Hal ini mempunyai konsekuensi adanya tuntutan pengembangan pelayanan di PSKW Yogyakarta.
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan PSKW Yogyakarta menyebabkan adanya opini negatif masyarakat dimana mereka menganggap PSKW Yogyakarta sebagai tempat pekerja seks komersil (PSK). Sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat pada PSKW Yogyakarta masih kurang.
5. Adanya keterbatasan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada pekerja sosial serta sarana dan prasarana keterampilan jahit; tata rias; dan olahan pangan, yang menjadi faktor penghambat.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada studi tentang pendampingan pekerja sosial terhadap klien pada pelaksanaan bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan pekerja sosial terhadap klien pada bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta?
2. Apa saja peran pekerja sosial dalam pendampingan terhadap klien pada pelaksanaan bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendampingan pekerja sosial terhadap klien pada bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pendampingan pekerja sosial terhadap klien pada bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta.
2. Mengetahui peran pekerja sosial dalam pendampingan terhadap klien pada pelaksanaan bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta.

3. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendampingan pekerja sosial terhadap klien pada bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pendidikan Luar Sekolah
 - a. Memberikan ilmu pengetahuan tentang Pendidikan Luar Sekolah, khususnya tentang “pendampingan pekerja sosial terhadap klien pada pelaksanaan bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta”.
 - b. Sebagai masukan dan koreksi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
2. Bagi Lembaga
 - a. Sebagai masukan dan koreksi dalam memperbaiki pelayanan pendampingan terhadap klien.
 - b. Mengetahui tingkat keberhasilan pelayanan pendampingan pada bimbingan keterampilan.
3. Bagi Peneliti
 - a. Peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai “pendampingan pekerja sosial terhadap klien pada pelaksanaan bimbingan keterampilan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta”.
 - b. Sebagai bahan acuan dalam menerapkan pendampingan sosial pada masyarakat nantinya.